

Judul : Komisi VII: siapkan akses pembiayaan
Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Komisi VII: Siapkan Akses Pembiayaan

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengapresiasi kebijakan Pemerintah menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) transportasi digital. Ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan sosial ekonomi mereka.

Chusnunia menjelaskan, perkembangan ekonomi digital membawa perubahan besar terhadap struktur pasar kerja di Indonesia saat ini. Platform digital membuka kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat. Namun, kondisi ini menghadirkan tantangan baru terkait regulasi, hubungan kemitraan, perlindungan pekerja, hingga tata kelola ekonomi digital nasional.

Makanya, perubahan status ojol jadi pelaku UMKM tidak boleh dipahami sekadar perubahan administratif biasa. Kebijakan ini harus jadi momentum tepat untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat luas. "Perubahan ini sekaligus menciptakan ekosistem transportasi online yang jauh lebih adil serta berkelanjutan," katanya, Selasa (11/8/2026).

Dia menyebut, penetapan status baru ini memberi peluang pengemudi ojol untuk mengembangkan usaha lain di luar aktivitas utamanya. Dengan fleksibilitas itu, pengemudi bisa bekerja untuk beberapa pemberi kerja sekaligus, juga berpotensi meningkatkan penghasilan lebih optimal.

Selanjutnya, kata dia, Pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret pasca-penetapan status ini. Apalagi jumlah pengemudi ojol cukup besar.

Data Kementerian Perhubungan (Kemhub), jumlah pengemudi ojol di Indonesia mencapai lebih dari tujuh juta. Mereka tersebar di berbagai wilayah dan menggunakan beragam platform aplikasi transportasi online.

Penetapan status ojol sebagai pelaku UMKM, sambungnya, perlu ditindaklanjuti dengan program pelatihan pemberdayaan terarah. Karena pengemudi ojol juga memerlukan pembukaan akses pembiayaan secara luas untuk mendukung modal usaha. "Ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para mitra pengemudi secara berkelanjutan," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR Gandung Pardiman mengapresiasi langkah Pemerintah atas penetapan ini. Langkah ini jadi bentuk pengakuan negara terhadap 2,8 juta pekerja ekonomi digital. Status baru itu juga memberi payung hukum untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, hingga jaminan sosial.

Melalui status UMKM, menurutnya ojol berhak mengakses pembiayaan KUR mikro bunga tiga persen dan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM. Mereka berhak memperoleh pelatihan digitalisasi, keselamatan berkendara, serta manajemen keuangan.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengklaim, para pengemudi ojol telah sepakat dengan rencana Pemerintah menetapkan status mereka jadi pelaku UMKM. Kementerian UMKM telah berdialog bersama 20 asosiasi dan komunitas ojol. ■ PVB